

## Polri Terima Memori Banding Irjen Teddy Minahasa Terkait PTDH

JAKARTA (IM) - Polri menyatakan telah menerima memori banding yang diajukan oleh Irjen Teddy Minahasa terkait dengan keputusan sidang etik Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota polisi dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

"Hari ini memori bandingnya diterima," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Kamis (22/6).

Ramadhan menuturkan, setelah ini pihaknya akan mempelajari memori banding tersebut untuk selanjutnya digelar sidang banding.

"Kemudian akan dipelajari dulu tentunya ya," ujar Ramadhan.

Sebelumnya, Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri resmi menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Teddy Minahasa.

"Pelanggar (Irjen Teddy Minahasa) menyatakan banding," kata Ramadhan di Gedung TNCC, Jakarta Selatan, Selasa (30/5) malam.

Dalam sidang ini, Ramadhan mengungkapkan bahwa, KKEP menyatakan bahwa, perbuatan yang dilakukan

oleh Irjen Teddy Minahasa dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

"Putusan KKEP Polri, 1 sanksi etika yaitu perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi administratif, berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ujar Ramadhan.

Untuk diketahui, pada putusan Pengadilan tingkat pertama, Teddy divonis hukuman pidana seumur hidup penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Ia dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram.

Teddy dinilai terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tindak pidana itu turut melibatkan AKBP Dody Prawiranegara, Linda Pujiastuti, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Parluhan Situmorang, Muhammad Nasir, dan Syamsul Maarif. • lus

FOTO: ANTARA



### BAKTI KESEHATAN DI MAPOLDA JATIM

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) berbincang dengan pasien saat menghadiri Bakti Kesehatan di Mapolda Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/6). Bakti Kesehatan yang diantaranya diisi dengan pengobatan, vaksinasi, hapus tato serta bantuan kesehatan lainnya secara gratis tersebut dalam rangka menyambut HUT ke-77 Bhayangkara dengan tema Polri Presisi untuk Negeri.

## Kapolri Serukan Polri Siap Jadi Organisasi Modern Tidak Antikritik

Kapolri sebut bahwa seluruh insan Korps Bhayangkara harus bisa menerima kritikan, masukan atau koreksi agar lebih lagi ke depannya.

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerukan, Polri siap menjadi organisasi modern yang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini demi memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman, terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolri dalam kegiatan Penganugerahan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Award Tahun 2023, di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (21/6) malam. Jenderal Listyo Sigit mengakui bahwa setiap elemen warga berhak mengawasi

seluruh personel kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pelayan dan pengayom serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Walau diakuiinya, seluruh hal itu tidaklah mudah sebaliknya membalikan telapak tangan dalam pelaksanaan nyata dilapangan.

"Kami sadari bahwa kami memiliki tugas pokok yang tentunya dalam keseharian selalu diikuti. Dan tidak mudah untuk melaksanakan apa yang namanya harkamtibmas, perlindungan, pelayanan, pengayoman serta melaku-

kan penegakan hukum," ujar Listyo Sigit.

Listyo menyebut, saat ini Indonesia sudah memasuki era Citizen Journalism atau Jurnalisme warga. Dimana, kapanpun, dan siapapun bisa menjadi sumber berita, sehingga semua menjadi lebih terbuka.

"Setiap apa yang kita lakukan, masyarakat tahu pada saat baik, maka apabila masyarakat kemudian ingin angkat menjadi baik. Demikian pula sebaliknya pada saat kita buruk, apabila masyarakat angkat dan viralikan maka wajah kita menjadi buruk. Ini adalah risiko yang kita hadapi didalam era seperti ini," katanya.

Listyo menegaskan, seluruh insan Korps Bhayangkara dewasa ini, harus bisa menerima segala bentuk kritik, masukan dan koreksi untuk dijadikan bahan evaluasi demi menjadi lebih lagi ke depannya.

Ia menekankan kepada seluruh personel untuk bisa meninggalkan kebiasaan lama dan keluar dari zona nyaman demi perubahan organisasi yang lebih lagi.

Gejolak yang dihadapi Korps Bhayangkara sempat membuat kehilangan tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian. Namun, dengan

bergandengan tangan dan kerja keras seluruh personel Kepolisian, saat ini, berdasarkan hasil lembaga survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri kembali meningkat.

Ia menegaskan, Polri siap menerima apapun hasil lembaga survei terkait tingkat kepercayaan publik. Baik itu hasil survei ataupun positif akan dijadikan bahan evaluasi ke depannya.

Saat ini, Polri tidak takut ataupun risih apabila mendapatkan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat. Bahkan, tak jarang, apabila ada keluhan dari masyarakat terhadap Polri, maka hal itu kerap melibatkan peran dari Kompolnas.

"Banyak hal yang sudah diberikan kepada kita dari Kompolnas dan saat ini saya kira tidak ada lagi dari anggota kami atau apabila diperiksa Kompolnas. Justru kami bersyukur bahwa bisa mendapatkan koreksi dan koreksinya dalam rangka perbaiki dan membangun Polri," kata Sigit.

Listyo mengingatkan kepada seluruh personel kepolisian untuk terus menubar kebaikan dan mengukir prestasi. Jangan pernah lelah untuk turun langsung ke masyarakat guna mendengarkan dan menyerap seluruh aspirasi. • lus

## Syarat Sertifikat Sekolah Mengemudi untuk Buat SIM Belum Diberlakukan

JAKARTA (IM) - Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Yusri Yunus menegaskan bahwa, aturan pemohon SIM wajib melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi, masih belum diberlakukan.

Yuri mengatakan, pihaknya masih mengkaji aturan tersebut.

"Belum kita laksanakan karena kami masih mengkaji dengan situasional untuk negara Indonesia ini," kata Yusri dalam konferensi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/6).

Ketentuan lulus sekolah mengemudi diatur dalam Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

Menurut Yusri, Korlantas juga masih membuat aturan turunan terkait kebijakan tersebut. Setelah itu, Korlantas juga akan melakukan sosialisasi lebih lanjut ke masyarakat sebelum efektif diberlakukan.

"Secepatnya (diberlakukan). Jangan kita buru-buru

namun hasilnya sama saja," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, pihaknya sudah mulai menerapkan syarat adanya sertifikasi pelatihan menyeter untuk pembuatan SIM. Sertifikat tersebut membuktikan bahwa pembuat SIM sudah belajar menyeter kendaraan terlebih dahulu melalui sekolah mengemudi.

"Dia sudah memiliki keahlian, karena kalau ujian itu kan hanya menguji saja, tapi keahlian ini sebetulnya sudah mereka siapkan," ujar Latif saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/6).

"Dia memang sudah belajar melalui sekolah mengemudi, sehingga dikeluarkan surat sertifikasinya mengemudi tersebut," ujarnya.

Menurut Latif, proses pengeluaran sertifikasi itu nantinya diterbitkan melalui Indonesia Safety Driving Centre (ISDC). "Ya tentu kami ada namanya ISDC. Sudah kita siapkan seperti di Serpong untuk melakukan pelatihan, ya itulah kami sarankan untuk pelatihan," katanya. • lus

FOTO: ANTARA



### PENEMUAN EMPAT KERANGKA BAYI DI BANYUMAS

Polisi melakukan proses olah TKP di lokasi penemuan empat kerangka bayi di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (22/6). Polresta Banyumas terus melakukan pencarian lanjutan dengan menggali lokasi ditemukannya empat kerangka bayi yang diperkirakan berumur 1 hingga 10 tahun atas dugaan hasil tindak pidana.

## Polda Metro Masih Menunggu Petunjuk dari Korlantas soal Tes untuk Dapat SIM

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Korlantas Polri mengevaluasi ujian praktek dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Manuver zig-zag hingga angka 8 dalam praktek ujian SIM diminta diperbaiki.

Seperti diketahui, manuver zig-zag dan membentuk angka 8 ini diterapkan dalam praktek uji SIM. Satpas SIM Polda Metro Jaya, salah satunya yang menerapkan tes tersebut.

Menanggapi soal arahan kapolri tersebut, Dir Lantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Korlantas Polri.

"Kami akan menunggu instruksi dari Korlantas. Perubahan-perubahan yang seperti apa kita ikuti," ujar Latif saat dihubungi, Kamis (22/6).

Latif tidak berkomentar banyak soal evaluasi ujian praktek SIM ini. Namun, ia tegaskan teknis pelaksanaan evaluasi uji SIM masih menunggu arahan Korlantas lebih lanjut.

"Pasti ada petunjuk dan peraturannya dari Korlantas. Makanya kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari Korlantas," imbuhnya.

Sebelumnya, Jenderal Sigit meminta jajarannya terus melakukan perbaikan untuk mempermudah masyarakat, termasuk dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM). Sigit meminta Kakorlantas Polri segera melakukan perbaikan dalam praktik penerbitan SIM.

Pernyataan tersebut disampaikan Sigit dalam sambutannya di Upacara Wisuda Program Pendidikan S1 Ilmu Kepolisian angkatan ke-80, Widya Patria Tama, Pascasarjana S2 Angkatan ke-11 STIK Lemdiklat Polri T.A 2023 dan Pascasarjana S3 Lemdiklat Polri T.A 2023. Agenda dilaksanakan di Gedung PITIK/STIK Jakarta Selatan.

"Pembuatan SIM, ini masih dilihat sulit. Laporan kasus juga sama, balik nama kendaraan juga sama, dan seterusnya. Saat ini kita terus melakukan upaya perbaikan," kata Sigit.

"Saya kira Pak Kadiv TIK, Pak As Ops, Pak Kabik, Kakorlantas, sedang berusaha melakukan perbaikan, dari yang awalnya manual kita ubah menjadi digitalisasi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan cukup dengan menggunakan aplikasi yang saat ini kita siapkan, kita sedang satukan semua aplikasi menjadi satu layanan namanya Super Apps," ujarnya.

Sigit juga menyroti syarat ujian mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara sepeda motor adalah membuat lintasan berbentuk angka delapan. Dia meminta syarat 'bikin angka delapan' itu dievaluasi.

"Dan khusus pembuatan SIM, ini saya minta Kakorlantas tolong dilakukan perbaikan, yang namanya angka delapan itu masih sesuai atau tidak, yang namanya melewati apa itu, zig-zag zig-zag itu, masih sesuai atau tidak. Saya kira kalau memang sudah tidak relevan, perbaiki," perintah Jenderal Sigit. • lus

## Polres Rohul Kerahkan 2 Helikopter dan Alat Berat untuk Padamkan Karhutla

PEKANBARU (IM) - Polres Rohul, Riau, Bersama beberapa polsek jajaran, berjabaku melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, yang sudah terjadi beberapa hari ini.

Selain dari Polri, pemadaman karhutla juga dilakukan tim dari TNI dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rohul dan warga setempat.

Untuk membantu pemadaman, tim gabungan mengerahkan dua alat berat dan beberapa alat lain seperti 2 mesin mini Tohatsu, 15 mesin mini striker, selang 35 gulung, nozel 12 buah.

Untuk kekuatan personil Polri terdiri dari 30 anggota dari Polres Rohul, 30 anggota dari Pol-

sek Bonai Darussalam 15 orang, Polsek Tambusai 5 personil, Polsek Tambusai Utara 5 orang dan Polsek Kepenuhan 5 orang. Kebakaran sudah terjadi sejak empat hari. Api berhasil diatasi pada 21 Juni 2023 malam. Namun sampai hari ini 22 Juni 2023 upaya pendinginan tetap di lokasi kebakaran agar api tidak muncul kembali.

"Api sudah padam, namun kami masih di lokasi untuk melakukan pendinginan di lahan. Kita tetap di lokasi sampai benar-benar asap hilang, luas lahan yang terbakar sekitar 20 ha," ujar Budi.

Dijelaskannya bahwa awal kebakaran di sekitaran Desa Pauh diduga berasal dari daerah lain. Dimana kepala api atau titik api pertama berasal dari Desa Pangkalan Ribut dan Desa

Buluh Apuh Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Untuk menjegah api meluas ke Rohul, Tim juga melakukan upaya pemutusan kepala api dengan cara membuat kanal bloking (parit) sepanjang 721 meter. Dijelaskannya bahwa api sulit dipadamkan karena kedalaman gambut di lokasi yang terbakar.

"Memang agak sulit memadamkannya, sebab lahan yang terbakar jenis gambut kering yang kedalamannya sekitar 10 meter," kata Budi.

Selama upaya pemadaman, pihak darat terus melakukan komunikasi tim udara untuk membantu pemadaman dengan water bombing. Dimana ada dua helikopter dikerahkan selama pemadaman di lokasi. • lus

FOTO: FRANS



**SIMBOLIS PEMBERIAN BANTUAN BERAS HASIL RAMPASAN NEGARA** Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr Rudy Heriyanto menghadiri simbolis pemberian bantuan beras rampasan Negara untuk masyarakat penerima manfaat hasil eksekusi Kejaksaan Negeri Serang di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, Kamis (22/6). Hadir Kajati Provinsi Banten Dr Didik Farkhan Alisyahdi, Pj gubernur Banten Al Muktabar, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto, Kabid Propam Polda Banten Kombes Pol Riko Junaldi, Dirreskrimsus Polda Banten Dedi Supriyadi.